

KETERLIBATAN INDUSTRI DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM PADA TINGKAT SMK

Mochamad Sobari¹⁾, Dinn Wahyudin²⁾, Laksmi Dewi³⁾
^{1,2,3}Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia

¹sobari.bari626@upi.edu

²dinn_wahyudin@upi.edu

³laksmi@upi.edu

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 31 Desember 2022

Revisi, 4 Juni 2023

Diterima, 30 Agustus 2023

Publish, 15 September 2023

Kata Kunci :

Kurikulum
Keterampilan
SMK
Sinkronisasi

ABSTRAK

Pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengedepankan agar lulusannya dapat langsung diterima pada dunia usaha dan dunia industri. Agar para lulusan SMK dapat langsung diterima kerja pada sebuah lembaga diharuskan memiliki keterampilan yang memang sesuai dengan kebutuhan di lembaga tempat mereka bekerja nanti. Keterampilan para lulusan itu pun tidak hanya sebatas yang dilatihkan di sekolah saja, akan tetapi keterampilan tersebut harus sudah teruji di dunia kerja sebenarnya. Agar keterampilan peserta didik SMK tersebut dapat teruji di dunia kerja maka diperlukan support dari sekolah untuk dapat memfasilitasinya dengan cara melakukan kerjasama antara sekolah dan dunia kerja dengan mensinkronkan kurikulum sekolah dengan kebutuhan industri. Permulaan kerjasama antara industri dengan sekolah adalah dengan melakukan kemitraan dengan menyesuaikan kurikulum sekolah dengan kebutuhan industri. Melakukan kemitraan ini dimaksudkan agar kesenjangan antara pendidikan di sekolah dan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia industri teratasi. Jika kesenjangan tersebut telah dapat teratasi maka diharapkan penyerapan lulusan SMK akan semakin tinggi.

This is an open access article under the CC BY-SA license



Corresponding Author:

Mochamad Sobari

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia

sobari.bari626@upi.edu

1. PENDAHULUAN

Kurikulum sesuai pasal 1 butir 19 UU Nomor 20 Tahun 2003 merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Imas Kurniasih, 2014. Hlm, 3). Komponen yang mendukung suatu instansi pendidikan diantaranya adalah kurikulum, dimana kurikulum ini menjadi suatu poros dalam pendidikan untuk dapat membentuk karakter peserta didik agar dapat mencapai potensinya, sehingga ketika peserta didik tersebut tuntas melaksanakan pembelajaran dari sekolahnya dapat memaksimalkan soft skill dan hard skill yang telah dilatih selama di sekolah. Untuk mencapai tujuan pendidikan pemanfaatan kurikulum harus dimaksimalkan agar pada proses pendidikan peserta didik dapat menggali hal apa saja yang perlu dipelajari dan kegiatan apa

yang harus peserta didik alami agar dapat membangun kompetensi yang diperlukan dalam dunia setelah mengenyam dunia sekolah.

Kurikulum berubah sesuai dengan perubahan iklim disekitarnya, oleh karenanya perubahan dapat terjadi pada sebagian komponen tertentu, atau dapat pula perubahan itu bersifat keseluruhan yang menyangkut semua komponen kurikulum, perubahan kurikulum yang menyeluruh meliputi orang-orang yang terlibat dalam pendidikan. Pendidikan di Indonesia memiliki berbagai keanekaragaman mulai dari jenis pendidikan formal dan non formal (SD, SMP, SMA, SMK, PT dan pendidikan keagamaan : MI, MTS, MA, Universitas Keagamaan dan Pesantren). Pendidikan SMK berada pada pendidikan menengah beriringan dengan SMA dan MA.

Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan tingkat SMK maka menurut Wahyudin (2014, Hlm.

223) terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut :

- a. Pendidikan kejuruan harus dapat dilaksanakan secepat mungkin (*education in short*)
- b. Pendidikan kejuruan dalam pengembangannya harus berorientasi kepada jenis-jenis pekerjaan yang dibutuhkan di lapangan (*orientation*)
- c. Pendidikan kejuruan diatur sedemikian rupa supaya peserta didik dapat keluar dan masuk lembaga pendidikan secara mudah (*free entry exit*)
- d. Apapun yang dilakukan SMK harus sesuai dengan permintaan pasar *demand driven* bukan pasar yang harus menyesuaikan SMK
- e. Pengembangan pendidikan SMK harus terbuka atas terjadinya interaksi antar disiplin ilmu serta disiplin teknologi (*Cross discipline*)
- f. SMK haruslah berani mengembangkan teknologi yang sedang dan akan berkembang (*forward technology*)

Dari berbagai jenjang pendidikan di Indonesia, pengembangan kurikulum yang melibatkan dunia usaha dan dunia industri dalam pelaksanaannya ada pada pendidikan jenjang pendidikan menengah yaitu SMK.

Selama pengembangan kurikulum dan proses transfer pengetahuan, pemangku kepentingan industri tidak berkonsultasi tentang inti kompetensi atau diberi kesempatan untuk memberikan masukan atau keterlibatan apa pun. Prosedur ini mirip dengan yang ada di negara berkembang lainnya di mana ada kekurangan dalam kurikulum dan kesenjangan besar antara akademisi dan industri (Mayaka and Akama, 2007).

Beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap pengembangan kurikulum SMK yaitu :

- a. *Change in occupation* : Perubahan dunia kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum SMK. Kebutuhan dunia kerja dan industri akan tenaga kerja yang berkualitas dan bidang profesi yang berkembang secara dinamis menjadi tantangan yang jelas bagi kurikulum tersebut.
- b. *Change in technology* : Perkembangan teknologi yang semakin maju tentunya membutuhkan kualifikasi profesional yang sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada, sehingga kurikulum harus selalu mampu menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan perkembangan teknologi tersebut.
- c. *Change in community* : Salah satu tugas pendidikan atau kurikulum adalah melayani masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik, kurikulum harus sesuai dengan perkembangan masyarakat dan mampu mendukung perubahan masyarakat menjadi lebih baik.

Mengingat sifat terapan dan disiplin lulusan SMK, sangat penting untuk meminta saran strategis tentang desain kurikulum dari industri (Semrad et al., 2012). Masukan ini memastikan bahwa kompetensi inti terpenuhi dan bahwa lulusan akan memiliki

keahlian yang diperlukan untuk pekerjaan (Peacock and Ladkin, 2002). Selain itu, di luar desain kurikulum, hubungan yang dekat dengan industri sangat penting untuk dapat melaksanakan magang dan penempatan kerja, proyek peserta didik, penelitian guru dan peluang konsultasi, dan banyak hal lainnya (Peacock and Ladkin, 2002). Oleh karena itu, peran industri dalam membantu pengembangan kurikulum sangat penting, dan akademisi akan dapat mengumpulkan input yang dibutuhkan dan mendemonstrasikan kegunaannya (Semrad et al., 2012).

Matriks kompetensi inti dirancang dengan lima kategori kemampuan intelektual, keterampilan teknis, pengetahuan industri, keterampilan interpersonal dan keterampilan profesional sebagai instrument kunci (Semrad et al., 2012).

Untuk memulai mengembangkan kurikulum, dengan harapan skill yang akan dimiliki peserta didik dapat digunakan dengan maksimal, maka hal pertama yang dapat dilakukan adalah dengan memulai kerjasama dengan dunia usaha/dunia industri (DU/DI) atau melakukan *partnerships*. Sifat dari *partnerships* ini mungkin dipandang sebagai rangkaian kesatuan mulai dari kolaborasi informal hingga kesepakatan formal yang kompleks untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan. Fitur utama dari *partnerships* adalah tanggung jawab bersama untuk mencapai hasil yang disepakati – berbagi keberhasilan dan kegagalan (Billett et al. 2007).

Gagasan *partnerships* tampak sederhana dan jelas. Namun, ini bisa melibatkan pengaturan yang kompleks dan berlapis-lapis. Akibatnya, akan ada banyak kerangka teoritis untuk membuat konsep struktur dan proses *partnerships* yang harus disepakati (Pillay, Watters, and Hoff, 2013). Berikut ini, beberapa subkategori yang mempengaruhi *partnerships*. Ini adalah (1) berbagi visi (2) hubungan, peran dan tanggung jawab, dan (3) pemantauan proses untuk mendukung hasil yang saling menguntungkan. (Pillay, Watters, and Hoff. 2013).

Berbagi Visi

Agar *partnerships* menjadi efektif, mitra idealnya menerjemahkan visi bersama ke dalam tujuan yang disepakati dan memastikan bahwa proses akuntabilitas informal dan formal untuk input, proses dan outcomes sesuai sebagaimana mestinya (Acar and Robertson 2004). Perjanjian *partnerships* yang menggambarkan detail ini, sebagai prasyarat untuk kelancaran proses *partnerships* dan pencapaian hasil (Bryson, Crosby, and Stone. 2006). Mencapai tujuan yang disepakati bersama berdasarkan visi bersama bergantung pada daya tarik dari perpaduan yang tepat antara pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas praktis para mitra, untuk mencapai outcomes yang tepat. *Partnerships*, bagaimanapun bukan penggabungan dari kapasitas *partnerships* yang terpecah, akan tetapi integrasi dari kapasitas mereka. Sehingga penggunaan pengetahuan dan skill yang

khusus dapat diintegrasikan dengan tepat sesuai dengan kebutuhan DU/DI.

Hubungan, peran dan tanggung jawab

Faktor penting dalam mencapai outcomes secara efektif adalah dengan menjaga kualitas hubungan dengan mitra, dalam hal kemampuan untuk bekerja sama, saling menghormati, dan percaya satu sama lain (Siddiquee, 2011). Hubungan antara sekolah dan industri, akan berkembang pesat jika semua stakeholder bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama (Johns et al. 2001). Proses yang perlu pertama kali dilakukan adalah dengan membuka percakapan atau komunikasi dan melakukan konsultasi antara stakeholder yang memiliki project pengembangan kurikulum antara sekolah dan DU/DI. Sehingga hasil dari membangun rasa percaya, saling menghormati, dan saling membantu akan menjadikan partnerships antara sekolah dan DU/DI berlanjut dengan baik. Pengalokasian sumber daya yang dapat berupa keuangan, sumber daya manusia dan beberapa fasilitas yang disediakan harus memiliki rasa tanggung jawab antar mitra dalam menggunakannya karena berhubungan dengan tujuan dilakukannya kerjasama antar mitra sehingga perpaduan pengetahuan dan skill sesama mitra dapat mencapai tujuan bersama. Rasa tanggung jawab dalam penggunaan sumber daya harus jelas agar resiko dan keuntungan terbagi secara merata serta sebagai cerminan dari input dari masing-masing mitra. Dilain pihak, perjanjian partnerships harus mencantumkan tanggung jawab masing-masing mitra, menjelaskan dan menyetujui kesepakatan serta bertanggung jawab untuk mengelola partnerships secara efektif (Kilpatrick and Guenther 2003). Klarifikasi peran dan tanggung jawab ini sering disertai dengan struktur manajemen yang akan membantu memfokuskan pengendalian sumber daya, transparansi, akuntabilitas, pelaporan dan sejenisnya (Bryson, Crosby, and Stone 2006)

Pemantauan proses untuk mendukung hasil yang saling menguntungkan.

Menghubungkan hasil partnerships, khususnya di bidang pendidikan, telah menjadi sebuah tantangan. Kemitraan sering mengalami kerugian dikarenakan ketidakmampuan dalam penggunaan sumber daya seperti dokumentasi dan pengawasan dari berbagai aspek kemitraan (Acar and Robertson 2004, 336). Jika hal ini lebih sering terjadi maka akan mengakibatkan perencanaan awal yang sudah disepakati menjadi terbengkalai dan menghasilkan kegagalan indikator terhadap outcome yang diinginkan, menghasilkan kegiatan evaluasi yang jarang dan tidak konsisten, yang dapat menjadi masalah untuk kelancaran dari kemitraan. Evaluasi dapat juga dapat terhalang dikarenakan kurangnya penggunaan akses informasi diantara rekan. Meskipun akan lebih sulit untuk menjelaskan hasil outcome secara umum dan spesifikasi input dari kemitraan ini, melakukan monitoring dan evaluasi akan sangat diperlukan. Oleh karena itu, diperlukan prosedur pengelolaan untuk

diklarifikasi secara tepat dan alokasi sumber daya harus cukup terperinci.

Singkatnya, isu-isu kunci yang diangkat di atas yang berkontribusi pada kemitraan yang efektif adalah (1) berbagi visi dan tujuan; (2) kejelasan dari pengalokasian sumber daya, perpaduan antara pengetahuan dan keterampilan, serta peraturan tentang tanggung jawab dari sesama mitra; (3) pemerintahan dan struktur manajemen harus fokus untuk memonitoring performa dari dibentuknya kemitraan ini, termasuk didalamnya kesepakatan dari input dan output yang diterima untuk keuntungan bersama.

Agar bentuk kemitraan ini menjadi lebih jelas maka harus tercatat dalam dokumen resmi yang didalamnya terdapat inti point terbentuknya kerjasama ini. Dokumen yang dimaksud adalah proposal, yang minimal didalamnya fokus untuk tiga hal, yaitu: pengembangan kurikulum dalam manajemen sekolah, Pengembangan kapasitas Staf sekolah dan peserta didik, pengembangan kelembagaan yang melibatkan para pemimpin administrasi senior.

Menurut Thapa (2012) mengembangkan kurikulum dalam manajemen sekolah terhadap kebutuhan industri dapat dilakukan dengan cara (1) mengadakan analisis situasi terhadap kebutuhan industri; (2) mengunjungi institusi yang berhubungan dengan lulusan SMK; (3) konsultasi dengan kementerian tenaga kerja tentang kesenjangan keterampilan antara sekolah dengan DU/DI; (4) berintraksi dengan universitas yang menaungi SMK untuk membicarakan program pengembangan kurikulum dan hasil yang diinginkan; (5) mengembangkan inti matrik kompetensi dari industri dan meninjau nya berdasarkan literatur; (6) konsultasi dengan universitas yang fokus pada bidang kurikulum untuk menganalisis kebijakan dan prosedur pengembangan kurikulum; (7) mengembangkan struktur kurikulum dan kursus; (8) bekerjasama dengan universitas yang fokus pada bidang kurikulum untuk medesain strategi pedagogik; (9) menilai kelayakan dari menghubungkan lulusan tingkat SMK dengan DU/DI.

Setelah tahap pengembangan kurikulum, maka tahap berikutnya adalah dengan pengembangan kapasitas/kemampuan bagi staf sekolah dan peserta didiknya. Tahapan-tahapannya seperti melakukan (1) mengundang pihak industri untuk memberikan pembelajaran terkait isu-isu dunia industri yang sedang berkembang; (2) Secara aktif terlibat dengan peserta didik dan memberikan bimbingan; (3) mengidentifikasi pengalaman belajar dan kesempatan kerja praktis bagi peserta didik; (4) merumuskan jaringan dan kesempatan kerja dengan industri; (5) mencari dukungan dari universitas untuk mengembangkan skill, pengetahuan dan teknik mengajar; (6) memfasilitasi seminar tentang metodologi penelitian.

2. METODE PENELITIAN

Penulis menulis artikel ini dengan metode deskriptif yaitu menggunakan library research atau studi literatur atau disebut juga dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data pustaka yang selanjutnya dibaca, dicatat serta diolah lebih lanjut (Zed, 2014).

Tujuan dari tinjauan literatur adalah untuk mengetahui bahwa pengetahuan terus berkembang, bahwa topik penelitian dan variabel penelitian yang peneliti susun telah dipelajari oleh peneliti lain, dan peneliti dapat belajar dari apa yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Para peneliti bukanlah peneliti pertama yang menangani masalah dan masalah ini. Pencarian literatur memiliki dua tujuan utama. Pertama, tinjauan literatur, yang tujuannya adalah untuk menulis artikel yang menyajikan penelitian baru tentang topik tertentu yang perlu diketahui oleh mereka yang mengerjakan topik tersebut. Penelitian ini dapat dipublikasikan kapan saja untuk kepentingan umum. (Tjahjono, H., 2018)

Tujuan kedua dari studi literatur adalah untuk memberikan manfaat bagi proyek penelitian itu sendiri, dalam hal ini melakukan tinjauan pustaka berfungsi untuk memperkaya pendapat peneliti tentang topik penelitian, membantu peneliti merumuskan masalah penelitian, dan membantu peneliti mengembangkan teori yang tepat dan menentukan metode untuk penelitian-penelitian yang dilakukan (Marzali, 2016).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterlibatan industri dalam pengembangan kurikulum dilakukan agar kualitas lulusan SMK mengalami peningkatan, adapun bentuk kemitraan yang dapat terjadi setelah pengembangan kurikulum yang telah disesuaikan dengan DUDI adalah dengan melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL).

Praktik Kerja Lapangan merupakan bentuk pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) Pendidikan Sistem Ganda atau Praktik Kerja Lapangan merupakan tahapan diklat profesi dimana seorang peserta didik yang hampir menyelesaikan studinya resmi aktif berpraktik di bawah bimbingan yang berkualitas. untuk menjadi administrator sistem pada waktu tertentu dengan tujuan mengembangkan tanggung jawab dan keterampilan selama mengikuti PKL (Hamalik, 2007:91)

TVET merupakan salah satu sektor pendidikan terpenting di Indonesia yang dirancang untuk menghasilkan sumber daya manusia siap kerja untuk meningkatkan produktivitas dan perekonomian nasional. Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa selepas lulus dari SMK tingkat penyerapan alumni meningkat. Indonesia telah mengatur masalah pendidikan dalam UU No. 20 Tahun 2003 termasuk TVET. Sistem TVET Indonesia terdiri dari dua bagian, yaitu (1) pendidikan kejuruan, dan (2) sistem pelatihan kejuruan untuk bekerja.

(1) Pendidikan Kejuruan. Indonesia menyediakan pendidikan kejuruan tingkat menengah atas di sekolah kejuruan (Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK) dan pendidikan kejuruan tingkat tinggi di Universitas, Institut, Politeknik, Sekolah Tinggi Teknik di bawah pengawasan Dewan Pendidikan Tinggi (DIKTI). Pendidikan tinggi kejuruan disebut sebagai pendidikan profesi. Lulusan dapat memperoleh gelar menengah di Diploma 1, 2 dan 3 (D1, D2, D3) dan sarjana terapan di D4. Lembaga pendidikan di Indonesia dikembangkan, dipantau, dievaluasi oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Proses akreditasi dan pengendalian mutu dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional (Kurnia, 2014).

(2) Pelatihan Kejuruan. Pelatihan kejuruan di Indonesia diatur oleh UU Ketenagakerjaan (UU 13/2003) dan peraturan (PP 31/2006) tentang pelatihan nasional untuk sistem kerja. Program ini dikelola oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menyediakan balai pelatihan tenaga kerja Ini menawarkan beberapa pelatihan kejuruan untuk meningkatkan kompetensi lulusan dari sekolah menengah umum, sekolah kejuruan, dan perguruan tinggi untuk memenuhi tuntutan industri (Kurnia, 2014).

LINK AND MATCH ANTARA SEKOLAH DAN INDUSTRI

Perubahan cepat dalam kehidupan kerja yang disebabkan oleh globalisasi dan revolusi industri memerlukan antisipasi dan penilaian keterampilan yang diperlukan untuk kehidupan kerja. Dinamika hubungan antara institusi pendidikan dengan dunia kerja dikaji diantaranya oleh beberapa ahli (Yorke. 2006), (Triki. 2008) terutama terkait dengan kesenjangan antara hasil pendidikan tinggi dan tuntutan kompetensi dunia kerja. Peran lembaga vokasi dalam menyediakan tenaga kerja yang kompeten di era industri 4.0 sangatlah penting. Perekonomian nasional sangat membutuhkan tenaga kerja yang kompeten sehingga membutuhkan sistem pendidikan yang berkualitas khususnya TVET.

Praktik pendidikan profesi di dunia dipimpin oleh dua tokoh terkemuka, John Dewey dan Charles Prosser. Di Indonesia, perkembangan PKL lebih banyak dipengaruhi oleh filosofi John Dewey dan mengadopsi teori Prosser. Pada tahun 1925, Charles Prosser mempresentasikan Prinsip Dasar PKL sebagai teori PKL yang paling banyak diterima. Dalam teori ini disebutkan 16 hal pokok dalam penyelenggaraan pelatihan kerja sebagai pendidikan kerja.

Ke 16 teori berpendapat bahwa pendidikan vokasi akan efektif dalam hal berikut : 1) Lingkungan belajar harus dirancang semirip mungkin dengan lingkungan kerja yang sebenarnya; 2) Proses pendidikan dan pelatihan dilakukan dengan cara yang sama, dengan operasi yang sama, alat yang sama, dan mesin yang sama seperti pada pekerjaan itu sendiri; 3) Siswa dibiasakan berpikir dan bekerja sesuai kebutuhan dalam kerja nyata; 4) Memotivasi siswa untuk meningkatkan minat, pengetahuan, dan

keterampilan pada tingkat yang setinggi-tingginya; 5) Hanya untuk siapa saja yang membutuhkan, menginginkan dan mampu untuk menguntungkan itu; 6) Membentuk pola pikir dan kebiasaan kerja secara terus menerus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan; 7) Guru dan instruktur harus kompeten dan memiliki pengalaman sukses; 8) Siswa harus memiliki kemampuan produktif minimal; 9) Perhatikan permintaan pasar kerja; 10) Siswa harus diberikan kebiasaan kerja dan berkarakter; 11) Siswa harus diberikan sumber yang dapat dipercaya dari pengalaman para ahli okupasi; 12) Siswa harus diberikan konten khusus sesuai dengan kebutuhan mereka di pasar kerja; 13) Memenuhi kebutuhan khusus kelompok mana pun saat mereka membutuhkannya; 14) Metode pengajaran harus memperhatikan hubungan dengan siswa yang mempertimbangkan karakteristik khusus dari kelompok tertentu; 15) Manajemen dan administrasi harus fleksibel daripada kaku dan standar; 16) Memerlukan dukungan dana yang cukup.

Link and match antara Lembaga dan Industri vokasi sangat penting untuk terus ditingkatkan. Sekolah harus memiliki hubungan yang baik dan mendalam dengan industri terkait untuk mengoptimalkan pembelajaran dalam menyiapkan lulusan secara efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan suatu sistem yang mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang yang dapat digunakan pada waktu yang tepat untuk menghasilkan karyawan dengan keterampilan yang dibutuhkan pada waktu dan lokasi dimana keterampilan tersebut dibutuhkan. (Ali, 2018)

Terdapat kesenjangan antara sistem pendidikan dengan pasar kerja dan industri di Indonesia (Reyes, 2008). Lulusan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Kebutuhan konsep link and match antara lembaga vokasi dan industri. Adapun aspek-aspek yang harus diperhatikan untuk menghubungkan dan mencocokkan antara sekolah dan kebutuhan industri adalah 1) Kualitas, 2) Kuantitas, 3) Lokasi dan 4) Waktu (Slamet, 2011). Pemerintah sebagai regulator harus mampu mengontrol keempat aspek tersebut untuk mengurangi dan memperkecil kesenjangan antara sekolah vokasi dan kebutuhan industri

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2020 Tentang PKL (Praktik Kerja Lapangan) Bagi Peserta Didik, diterbitkan dengan pertimbangan: a) bahwa perlunya pembelajaran di luar satuan pendidikan formal dan nonformal melalui praktik kerja lapangan untuk meningkatkan keterampilan siswa sejalan dengan tuntutan dunia kerja; b) bahwa untuk memenuhi pelatihan kerja lapangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur tentang pelatihan kerja lapangan bagi para peserta didik.

Bagi peserta didik, melakukan magang lapangan atau PKL mengacu pada peraturan

pembelajaran SMK/MAK, SMALB dan LKP bagi peserta didik, yang dilakukan melalui magang dalam kehidupan profesional dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kurikulum dan dengan kebutuhan dunia kerja.

Tujuan PKL menurut Husanah (2012;71) adalah; (1) memberikan insight kepada peserta didik agar dapat mengembangkan kemampuan merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi berbagai masalah atau informasi sesuai dengan spesialisasi mereka; (2) Untuk memperkenalkan siswa dengan lingkungan fisik, administrasi, akademik dan sosio-psikologis di mana PKL berlangsung; (3) Untuk menggunakan pengetahuan yang peserta didik peroleh di kelas dalam PKL; (4) Untuk memperkenalkan dan memberikan wawasan peserta didik terhadap DU/DI; (5) Menumbuhkan dan mengembangkan sikap profesional yang dibutuhkan peserta didik; (6) Mempersiapkan diri dari segi fisik, mental dan pengetahuan ketika memasuki DU/DI; (7) Menumbuhkan dan mengembangkan sikap siswa terhadap produktivitas dan kreativitas sebagai persiapan memasuki atau bersaing di dunia kerja; (8) Memperluas pandangan dan pendapat siswa tentang jenis pekerjaan di penempatan PKL peserta didik.

Peserta didik pada jenjang SMK, MAK, SMALB dan LKP dapat melaksanakan program PKL pada instansi yang memang sudah di arahkan oleh sekolah yang telah bekerja sama dengan dunia kerja. Dimana dunia kerja yang dimaksud meliputi: 1). Dunia Industri; 2) Dunia Usaha; 3) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); 4) Instansi pemerintah; 5) Lembaga lainnya

Penyelenggaraan PKL dapat dilaksanakan secara luring (*off line*) atau daring (*on line*). PKL yang dilaksanakan secara luring dilakukan dengan praktik pembelajaran secara langsung yaitu mendatangi langsung ke tempat oleh peserta didik di dunia kerja. PKL yang dilaksanakan secara daring diperuntukan bagi pembelajaran kompetensi keahlian berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Selain untuk pembelajaran kompetensi keahlian berbasis teknologi informasi dan komunikasi, PKL dapat dilaksanakan secara daring dalam keadaan tertentu, seperti bencana alam, bencana non alam atau kondisi geografis. Pelaksanaan PKL online dapat dilakukan setelah ada persetujuan tertulis dari pihak dunia industri.

Jika pelaksanaan PKL ke pihak dunia usaha/dunia industri tidak memungkinkan, SMK/MAK, SMLB dan LKP menyelenggarakan bentuk pembelajaran lain selain PKL. Bentuk pembelajaran lain sebagai pengganti PKL disesuaikan dengan DU/DI. Bentuk pembelajaran lain untuk menggantikan PKL berupa: Kewirausahaan sesuai program pendidikan yang diikuti dan atau Pembelajaran berbasis proyek berorientasi pada kebutuhan kehidupan kerja.

Agar pelaksanaan PKL dapat dilaksanakan dengan baik maka harus melewati beberapa tahap.

Tahapan tersebut harus melalui proses perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan monitoring serta melakukan evaluasi secara berkala ataupun setelah PKL dilaksanakan

A. Perencanaan

Perencanaan disini merupakan langkah awal dalam melakukan suatu kegiatan, menurut T. Hani Handoko dalam Rusman (2008) perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Sedangkan Hamalik (2008) mengatakan perencanaan adalah suatu proses intelektual yang melibatkan pembuatan keputusan. Dihubungkan dengan PKL ini maka perencanaan meliputi: 1) pemetaan kompetensi Peserta Didik; 2) penetapan lokasi PKL; 3) penetapan jangka waktu PKL; 4) pemetaan penempatan Peserta Didik sesuai kompetensi; 5) penetapan pembimbing PKL; dan 6) pembekalan Peserta Didik. Perencanaan disusun dalam dokumen perencanaan PKL.

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL) memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sekolah dan industri perlu meninjau penerimaan siswa dan menyesuaikan jadwal pelaksanaan PKL. Tata cara Pelaksanaan PKL dalam Pedoman Praktik Kerja Lapangan (PKL) (Dikmenjur (2018, hlm. 15-18) menyebutkan bahwa PKL dapat dilaksanakan secara harian terhitung (120-200 hari efektif), mingguan (24-40 minggu efektif). atau bulanan (6-10 bulan efektif). Alur Pelaksanaan PKL meliputi:

- 1) penempatan peserta didik di dunia usaha dan dunia industri yang disesuaikan dengan kompetensi yang telah peserta didik pelajari selama di sekolah;
- 2) melakukan praktik kerja lapangan di tempat, dan waktu yang telah ditentukan dan;
- 3) melakukan monitoring secara berkala oleh pembimbing PKL dari pihak sekolah dan dari pihak DU/DI.

C. Penilaian

Dikmenjur (2018, hlm. 31) mengatakan bahwa evaluasi PKL merupakan tanggung jawab mitra industri. Penilaian disampaikan kepada mitra industri dengan petunjuk dan kriteria penilaian dari sekolah. Selain itu, (Dikmenjur, 2018, hlm. 31) mengatakan bahwa pemberian nilai proses dan hasil kegiatan PKL berdasarkan sebagai berikut:

1) Penilaian Siswa

Tonggak penilaian hasil belajar siswa di DU/DI adalah penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan dengan beberapa predikat: Kelas 86-100 "sangat baik", kelas 70-85 "baik" dan kelas <70 "kurang". Nilai 70 merupakan ambang batas penyelesaian terkait dengan nilai minimal perolehan kompetensi DU/DI.

2) Pemberian Sertifikasi PKL

Institusi mitra harus menerbitkan sertifikat kepada peserta didik yang telah lulus dari praktik kerja lapangan. Peserta didik yang memenuhi syarat

mendapat sertifikat PKL dan yang belum memenuhi syarat mendapat surat keterangan telah mengikuti PKL

3) Pelaporan Nilai PKL

Pelaporan nilai Praktik Kerja Lapangan terdiri dari Sertifikat Peningkatan Keterampilan Kerja Lapangan yang diakui sebagai nilai-nilai Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Sertifikat Penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda yang berasal dari nilai-nilai Pengawas Industri dan Pembimbing Sekolah. Ini meliputi nilai-nilai sikap, pengetahuan dan keterampilan dari setiap kompetensi inti yang dipelajari di DU/DI dan sekolah.

4) Monitoring Pelaksanaan PKL

Pemantauan tersebut dilakukan untuk mendapatkan hasil sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan PKL. Tindak lanjut pelaksanaan PKL meliputi penempatan, penyiapan program PKL, materi PKL, pelaksanaan program PKL, ketekunan pembimbing, tantangan pelaksanaan selama studi PKL

Hamalik (2007, hlm 120-126) mengatakan bahwa penilaian hasil pelatihan meliputi hal-hal sebagai berikut :

1) Aspek pengetahuan

Perspektif informasi memainkan peran utama dalam merumuskan tujuan penelitian, sehingga menjadi prioritas evaluasi. Tujuan bidang aspek pengetahuan adalah membantu siswa dalam mengidentifikasi fakta, kemampuan memahami konsep dan teori, kemampuan mendefinisikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam bahan ajar, kemampuan siswa menganalisis masalah dan memecahkan masalah, serta membimbing siswa dalam kegiatan dan produk yang dihasilkan.

2) Aspek Keterampilan

Di akhir pelatihan, ada evaluasi yang menentukan perkembangan keterampilan siswa, yang meliputi aspek-aspek berikut:

- a) Aspek kemampuan kognitif dapat dideskripsikan dengan masalah-masalah familiar yang dipecahkan untuk menentukan tingkat ketelitian dan kesiapan individu melalui latihan jangka panjang.
 - b) Aspek keterampilan psikomotor, yaitu penggunaan tindakan pada saat kerja nyata, berdasarkan ketelitian, kewaspadaan, kualitas kinerja yang objektif.
 - c) Aspek keterampilan reaktif yang segera diwujudkan melalui pengamatan objektif terhadap perilaku pendekatan atau penghindaran.
 - d) Aspek keterampilan interaktif yaitu pembentukan spontan dengan mempertimbangkan kompetensi dan aturan seseorang dalam melakukan interaksi sosial di lingkungan tertentu
- ##### 3) Aspek Sikap

Penilaian aspek ini meliputi unsur apresiasi, minat, nilai, kesadaran dan karakter

D. Monitoring dan evaluasi

Pengawasan dan evaluasi praktik kerja lapangan oleh para guru memiliki tugas untuk mengawasi, mengajar dan mengevaluasi peserta didik yang melakukan magang di DU/DI. Pada umumnya pendampingan dan evaluasi digunakan untuk mengarahkan atau memandu proses pelaksanaan suatu kegiatan, untuk menentukan tingkat pencapaian kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan program yang diharapkan. Pengertian pendampingan adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh guru pembimbing selama magang DU/DI, yang pengawasannya meliputi pengawasan tugas-tugas praktik peserta didik. Sehingga guru pembimbing dapat melapor ke pihak sekolah. Pengertian asesmen atau evaluasi adalah tingkat keterampilan manajemen pengetahuan untuk menjelaskan pekerjaan dan perilaku peserta didik dalam menyiapkan magang/PKL yang sedang berlangsung. Tujuan monitoring dan evaluasi adalah; 1) mengamati dan mengevaluasi peserta didik selama magang/PKL untuk melihat apakah peserta didik memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kemampuan yang sesuai dengan bidang studi mereka selama PKL; 2) Memantau dan mengevaluasi apakah mahasiswa yang mengikuti program magang dapat meningkatkan kinerjanya dengan menyelesaikan tugas secara cepat, tanggap, dan tepat waktu; 3) mengamati dan mengevaluasi apakah peserta didik dapat menerapkan materi pembelajaran di sekolah yang disampaikan langsung oleh guru di DU/DI. (Subekhi dan Jauhar, 2012:80)

Pemantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode PKL. Peserta didik yang telah menyelesaikan PKL mendapatkan sertifikat keikutsertaan dari DU/DI. Sertifikat keikutsertaan PKL ditandatangani oleh pimpinan dunia kerja. Selain sertifikat keikutsertaan PKL, peserta didik dapat diberikan sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Fasilitas praktik kerja lapangan menurut Slameto (2010:68) Jika perlengkapan atau bahan pembelajaran sudah baik, maka akan memudahkan siswa untuk menerima materi yang diajarkan oleh guru. Karena perangkat diberikan dan digunakan langsung oleh peserta didik, sehingga peserta didik dapat dengan mudah mengadopsi dan menguasainya bersamaan dengan materi yang diberikan oleh guru sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan.

Setelah keterlibatan industri dalam pengembangan kurikulum berdampak pada lulusan siswa dalam bentuk PKL, maka hasil dari pengembangan itu pun berdampak kepada guru. Efeknya, guru dapat berpartisipasi aktif dalam program kemitraan untuk mendapatkan wawasan baru. Pemahaman baru ini memberi guru banyak ide untuk meningkatkan pembelajaran di kelas, dan guru akan lebih terinspirasi untuk mendisiplinkan siswa. Dengan semangat belajar di kelas, secara tidak langsung guru juga lebih berkompeten dalam mata

pelajarannya. Bentuk dari perolehan wawasan tersebut dapat berupa diklat yang dilaksanakan atas kesepakatan antara DU/DI dan sekolah agar semua informasi terbaru yang dimiliki industri dapat disinkronkan dengan informasi terbaru dalam dunia pendidikan.

Sedangkan dampak yang dialami sekolah adalah peningkatan kemampuan sekolah. Kompetensi sekolah dapat ditingkatkan dengan mengambil alih hal-hal yang dibutuhkan sekolah dari mitra. Sekolah dapat memperoleh manfaat dari program kemitraan ini dalam banyak hal, termasuk memberikan informasi terkini tentang keterampilan yang sedang dikembangkan.

Langkah - Langkah Pengembangan Kurikulum

Pada prinsipnya pengembangan kurikulum mengorientasikan kurikulum yang ada saat ini pada tujuan pendidikan yang diharapkan masyarakat saat ini dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, menurut H. Dakir (2004), pengembangan kurikulum harus bersifat anti aditif, adaptif dan aplikatif. Oleh karena itu, langkah-langkah berikut harus diperhatikan ketika mengembangkan kurikulum:

1. Perumusan Tujuan

Tujuan dirumuskan berdasarkan analisis kebutuhan yang berbeda, persyaratan dan harapan. Oleh karena itu, tujuan dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor masyarakat, peserta didik dan pengetahuan, yang dapat direpresentasikan dalam perumusan tujuan kelembagaan dan pendidikan (Tedjo Narsoyo. R, 2010:204)

2. Menentukan Isi

Isi kurikulum adalah pembelajaran yang ingin dimiliki siswa selama belajar. Pengalaman belajar ini dapat berupa mata kuliah atau jenis pengalaman belajar lainnya sesuai dengan format kurikulum

3. Memilih Kegiatan

Organisasi dapat dirancang sesuai dengan tujuan dan pengalaman belajar yang tertuang dalam kurikulum, dengan memperhatikan format kurikulum yang digunakan.

4. Merumuskan Evaluasi

Evaluasi pendidikan berkaitan dengan tujuan kurikulum, evaluasi harus dilakukan untuk mendapatkan umpan balik sebagai dasar perbaikan, sehingga evaluasi dapat dilakukan secara terus menerus.

Ada empat langkah dalam pengembangan kurikulum menurut model Rogers, yaitu (1) Pemilihan tujuan dari sistem pendidikan. Dalam menetapkan tujuan ini, satu-satunya kriteria panduan adalah kesiapan pendidik untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelompok intensif; (2) partisipasi guru dalam pengalaman guru dan pengalaman kelompok intensif; (3) mengembangkan pengalaman kelompok intensif untuk kelas atau sesi; dan (4) keterlibatan orang tua dalam kegiatan kelompok.

Menurut model Beauchamp dalam H. Dakir (2004) ada lima langkah dalam pengembangan kurikulum (Beauchp's System) :

- (1) Gagasan pengembangan kurikulum yang dilaksanakan di kelas, disosialisasikan di sekolah, dan disosialisasikan di sekolah-sekolah di daerah tertentu baik secara regional maupun nasional dikenal sebagai arena. Itu berarti; Menentukan area atau jangkauan area (sekolah, kecamatan, kabupaten, provinsi dan negara) yang dicakup oleh kurikulum.
- (2) Menunjuk tim pengembangan yang terdiri dari ahli kurikulum, ahli mata pelajaran, guru, pelatih dan sumber daya lainnya; Tujuannya adalah untuk menentukan staf, yaitu yang terlibat dalam pengembangan kurikulum
- (3) Tim mengembangkan tujuan pengajaran, bahan dan pelaksanaan belajar mengajar. Untuk tugas tersebut dibentuk Dewan Kurikulum sebagai koordinator yang juga berfungsi sebagai evaluator dalam pelaksanaan kurikulum, pemilihan mata pelajaran baru, pemilihan kurikulum yang akan digunakan dalam penentuan berbagai kriteria dan penyusunan kurikulum. kurikulum yang akan dikembangkan secara menyeluruh; Tujuannya adalah untuk membentuk organisasi dan proses pengembangan kurikulum. Fase ini mengacu pada prosedur yang harus diikuti dalam merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus, memilih konten dan pengalaman belajar, serta kegiatan penilaian dan menentukan kurikulum umum.
- (4) implementasi kurikulum; Sasarannya adalah melaksanakan atau mengimplementasikan suatu kurikulum tidaklah mudah karena memerlukan kemauan umum, kemauan guru, siswa, fasilitas, bahan dan biaya. Serta kepemimpinan dari kepala sekolah atau kepala daerah; dan
- (5) Mengevaluasi kurikulum yang berlaku; Artinya evaluasi kurikulum. Serta dilakukan dengan empat tahap a) evaluasi pelaksanaan kurikulum oleh guru, b) evaluasi desain kurikulum, c) evaluasi hasil belajar siswa, d) evaluasi sistem kurikulum secara keseluruhan.

Tahapan Pengembangan Kurikulum Menurut Hida Taba, ada lima tahapan dalam pengembangan kurikulum yang menggunakan model terbalik Taba, yaitu sebagai berikut :

- a) Mendiagnosa kebutuhan, merumuskan tujuan, menentukan materi, mencari penilaian, mempertimbangkan keluasan dan kedalaman materi, kemudian membuat kurikulum. Tentang perencanaan pengembangan kurikulum, tahap awal adalah mendiagnosa berbagai kekurangan, perbedaan latar belakang siswa, kebutuhan mengenal tenaga pengajar, dengan mengidentifikasi masalah, kondisi, kesulitan dan kebutuhan siswa dalam proses pengajaran. Langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan yang meliputi; 1) konsep atau ide yang akan dipelajari; 2) sikap, kepekaan dan perasaan yang akan dikembangkan; 3) cara berpikir semakin kuat; 4) Kebiasaan dan keterampilan yang harus

dikuasai. Penentuan materi Tahap pemilihan materi disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dan banyak tahapan lainnya hingga tahap penyusunan kurikulum dirumuskan.

- b) Mengadakan tri out : Tujuannya untuk menguji program yang telah selesai dengan situasi dan kondisi belajar yang berbeda untuk mengetahui validitas dan kepraktisannya sehingga dapat digunakan sebagai penyempurnaan.
- c) Mengadakan revisi atas dasar try out : artinya berdasarkan informasi yang terkumpul, dilakukan koreksi dan perbaikan serta ditarik kesimpulan (konsolidasi). Pada bagian ini untuk memperjelas kesimpulan dari revisi atas dasar try-out ada beberapa hal yang harus dipertanyakan: 1) apakah lingkunngan konten mencukupi, 2) apakah konten terstruktur secara logis, 3) apakah pembelajaran memberikan kesempatan untuk pengembangan intelektual, keterampilan dan sikap, 4) apakah konsep dasar dipertimbangkan?
- d) Mengembangkan kerangka kurikulum untuk menguji unit yang telah ditetapkan dalam lingkup yang sesuai berdasarkan landasan-landasan teori yang digunakan pada setiap bidang kajian.
- e) Menyampaikan bahwa ada kurikulum baru yang akan diberitahukan secara umum; berarti pelaksanaan dan diseminasi program di daerah dan sekolah, serta mengumpulkan informasi tentang persiapan lapangan yang terkait dengan implementasi kurikulum. Pengembangan kurikulum aktual dengan implementasinya yaitu pretesting tenaga pengajar profesional, sehingga model ini benar-benar memadukan antara teori dan praktik.

4. KESIMPULAN dan SARAN

Melakukan kemitraan antara sekolah dan industri dalam pengembangan kurikulum menyebabkan pihak industri dan sekolah sama-sama diuntungkan. melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dalam meningkatkan ketersediaan lulusan siswa SMK dalam bentuk kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak dunia usaha/ dunia industri, yang mana kerjasama tersebut dikemas dengan melakukan program praktik kerja lapangan sesuai dengan kemampuan bidang kerja masing-masing siswa, yang kemudian ditingkatkan dengan program-program pembelajaran yang dibutuhkan oleh dunia usaha/dunia industri. Singkatnya, ketika kurikulum berbasis industri yang inovatif dibuat secara kolaboratif melintasi batas-batas organisasi, ada peluang untuk mengatasi kekuatan yang biasanya menghambat kemajuan dalam pendidikan sektor publik. Lebih dari itu adalah manfaat pribadi yang ditawarkan kepada penerima manfaat, yaitu peserta didik yang dapat meningkatkan kesempatan kerja mereka. Perlu dicatat bahwa kemungkinan ini hanya mungkin jika industri dan sekolah bersedia melampaui batas-batas tradisional mereka.

5. REFERENSI

- Acar, M., and P. J. Robertson. (2004). "Accountability Challenges in Networks and Partner-ships: Evidence from Educational Partnerships in the United States." *International Review of Administrative Sciences* 70 (2): 331–344
- Ali, M, Laras, D, Zamtinah, Mardhapi, D, S. Soenarto (2018). Design of Electrical Engineer Profession Certification Model Based on Recognition of Prior Learning, IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1140 (2018) 012009 IOP Publishing, Doi:10.1088/1742-6596/1140/1/012009
- Billett, S., C. Ovens, A. Clemans, and T. Seddon. (2007). "Collaborative Working and Contested Practices: Forming, Developing and Sustaining Social Partnerships in Education". *Journal of Education Policy* 22 (6): 637–656
- Bryson, J. M., B. C. Crosby, and M. M. Stone. (2006). "The Design and Implementation of Cross-sector Collaborations: Propositions from the Literature." *Public Administration Review* 66 (s1): 44–55
- Johns, S., S. Kilpatrick, I. Falk, and B. Mulford. (2001). "Leadership From within: Rural Community Revitalisation and the School–Community Partnership." *Youth Studies Australia* 20 (3): 20–25
- Kilpatrick, S., and J. Guenther. (2003). "Successful VET Partnerships in Australia." *International Journal of Training Research* 1 (1): 23–43
- Kurnia, D, Ditrach, J, Murniati, E. D, 2014, Transferable skills in Technical and Vocational Education and Training (TVET) in Indonesia, accessed at <http://tvvet-online.asia> on February 2nd, 2019
- Kurniasih Imas. Berlin Sani. (2014). Implementasi Kurikulum 2013 Konsep dan Penerapan. *Surabaya : Kata Pena*
- Marzali, A. (2016). Menulis Kajian Literatur. *Jurnal Etnosia*, 1(2), 27–36.
- Mayaka M and Akama JS (2007) Systems approach to tourism training and education: the Kenyan case study. *Tourism Management* 28(1): 298–306
- Peacock N and Ladkin A. (2002). Exploring relationships between higher education and industry. *Industry & Higher Education* 16(6): 393–401
- Pillay, H., J. J. Watters, and L. Hoff. (2013). "Critical Attributes of Public–Private Partnerships: A Case Study in Vocational Education." *International Journal of Adult Vocational Education and Technology* 4 (1): 31–45
- Reyes, N., Candéas, P., Cafiadas, F., Reche, P. and Galan, S. (2008). Accreditation and Quality Assurance of Engineering Education Programs in the European Higher Education Area, New Challenges in Engineering Education and Research in The 21st Century. Budapest, Hungary
- Semrad K, Donohoe H, Thapa B, et al. (2012) Educating the next generation of tourism & hospitality managers: what core competencies will a globalized industry require from them? In: Schott C and Fesenmaier M (eds). *Tourism Education Futures Institute 6th Annual Conference Proceedings*. Milan–Transformational Leadership for Tourism Education, Milan, Italy 28-30 June, pp. 103–107. Philadelphia, PA: Tourism Education Futures Institute
- Siddiquee, N. A. (2011). "Rhetoric and Reality of Public–Private Partnerships: Learning Points from the Australian Experience." *Asian Journal of Political Science* 19 (2): 129–148.
- Slamet, PH, 2011, Peran Pendidikan Vokasi Dalam Pembangunan Ekonomi, *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, Juni 2011, Th. XXX, No
- Thapa B. (2012). Soft infrastructure in tourism development in developing countries. *Annals of Tourism Research* 39(3):1705–1710.
- Tjahjono, H., K. (2018). Studi Literatur Pengaruh Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural Pada Konsekuensinya Dengan Teknik Meta Analisis. *Jurnal Psikologi*, 35(1), 21–40.
- Triki. (2008). A Critical Evaluation of Vocational Education and Requirement for Libyan Manufacturing Industry
- Wahyudin, Dinn. (2014). Manajemen Kurikulum. *Bandung : Rosdakarya*
- Yorke, M. and Knight, P.T. (2006) Embedding employability into the curriculum. Learning and Employability. Series 1 No. 3. Higher Education Academy. Available from: <https://www.heacademy.ac.uk/knowledge-hub/embedding-employability-curriculum> (25 February 2019)
- Zed, M. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. *Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia*
- Hamalik, Oemar. (2007). Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan Pendekatan Terpadu. *Jakarta: PT. Bumi Aksara*
- Hamalik, Oemar. (2008). Manajemen Pengembangan Kurikulum. *Bandung: Remaja Rosdakarya*.
- Rusman. (2008). Manajemen Kurikulum. *Bandung: SPS Universitas Pendidikan Indonesia*
- Tedjo Narsoyo. R, 2010. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. *Bandung: Refika Aditama*.
- Widyastono, Herry. (2014). Pengembangan Kurikulum Di Era Otonomi Daerah. *Jakarta: Bumi Aksara*.
- Subekhi, Ahmad. dan Jauhar, Mohammad. (2012). Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia. *Jakarta: Prestasi Pustaka*